

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Program PUAP

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. PUAP menjadi bagian integrasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat (Departemen Pertanian, 2010).

Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di perdesaan, Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Gapoktan sebagai format final dari organisasi pada tingkat petani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi, unit kelembagaan keuangan mikro (Departemen Pertanian, 2007).

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan

ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan (Departemen Pertanian, 2010).

Kebijakan pengembangan Gapoktan PUAP menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar di perdesaan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Kabinet Indonesia Bersatu-II, melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Gubernur Bank Indonesia, telah mengatur strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A) di perdesaan dimana PUAP merupakan salah satu komponen dari LKM-A yang diatur dalam Keputusan Bersama tersebut (Departemen Pertanian, 2010).

Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gapoktan sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut disalurkan kepada anggota Gapoktan guna menunjang kegiatan usaha taninya. Tentunya dalam penyaluran dana tersebut terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan memanfaatkan bantuan tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan PUAP berjalan lancar, aman dan terkendali, maka dibentuk suatu tim pemantau, pembinaan, dan pengendalian di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Tim pusat melakukan pembinaan terhadap SDM di tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk pelatihan. Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh tim

Pembinaan di tingkat kabupaten/kota dilakukan antara lain pada

peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM-PUAP di tingkat kabupaten atau kota; koordinasi dan pengendalian; serta mengembangkan sistem pelaporan PUAP. Selanjutnya pembinaan pelaksanaan PUAP oleh tim teknis kabupaten atau kota kepada tim teknis kecamatan dilakukan dalam format pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan nantinya.

Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim pusat PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian. Pelaksanaan pengendalian dari tim Pembina PUAP provinsi hingga kepada tim teknis PUAP kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

B. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan strategi atau upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap suatu sumber daya ataupun program (misalnya: kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan) melalui penciptaan peluang yang seluas-luasnya agar masyarakat lapisan bawah petani mampu berpartisipasi. Menurut Roosgandha (2008), pada hakekatnya, makna pemberdayaan mencakup 3 aspek, yaitu:

- Menetapkan iklim kondusif yang mampu mengembangkan potensi masyarakat

- b. Memperkuat potensi atau modal sosial masyarakat demi meningkatkan mutu kehidupannya.
- c. Mencegah dan melindungi agar tingkat kehidupan masyarakat yang sudah rendah menjadi semakin melemah (semakin rendah). Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat agar tanggap dan kritis terhadap berbagai perubahan, serta mampu mengakses proses pembangunan untuk mendorong kemandirian yang berkelanjutan serta mampu berperan aktif dalam menentukan nasibnya sendiri.

Selain itu menurut Sutrisno (2005) konsep pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

Konsep pemberdayaan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari program pengelolaan

Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat agar tanggap dan kritis terhadap berbagai perubahan, serta mampu mengakses proses pembangunan untuk mendorong kemandirian yang berkelanjutan serta mampu berperan aktif dalam menentukan nasibnya sendiri.

C. Efektivitas Program PUAP

Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian dan tergantung pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan. Menurut Subagyo (2000), efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Menurut Richard Steers dalam buku Efektivitas Organisasi, efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Sedangkan menurut Komarudin (1994), efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau

... yang dimaksud adalah

tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.

Efektivitas program PUAP sendiri dapat dikonsepsikan sebagai suatu bentuk pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program PUAP sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun bentuk pengukurannya dapat dilakukan dengan menilik berbagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian program tersebut.

Menurut Departemen Pertanian (2010), beberapa rincian tujuan dari PUAP yaitu:

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh, dan Penyelia Mitra Tani.
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra

.

D. Peran Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan sebagai norma. Lembaga atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku individual dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. Pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai suatu aturan main (*role of the game*) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hirarki (Hayami dan Kikuchi, 1987). Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan serta tanggung jawabnya.

Lembaga perdesaan diperlukan untuk merangsang energi sosial pada masyarakat, akan tetapi dapat juga dijadikan sebagai tempat untuk membangun pembangunan di tingkat desa. Sesuai dengan terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membuat suatu kelembagaan di tingkat perdesaan yaitu Gabungan Kelompok Tani disingkat Gapoktan yang terdiri dari beberapa kelompok tani (Poktan). Kelembagaan perdesaan sangat dibutuhkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa yang memiliki potensi untuk maju.

Dengan adanya kelembagaan perdesaan, informasi dan teknologi baru dapat diterima

petani dengan baik, serta pemasaran hasil produksi petani akan lebih mempunyai harga jual yang tinggi, hal ini dikarenakan jaringan yang kuat antar sesama kelompok petani yang saling bekerja sama.

Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit sosial (kelompok kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerja sama yang setara dan saling menguntungkan.

E. Indikator Kinerja PUAP

Untuk menilai keberhasilan PUAP, diperlukan indikator dalam pelaksanaannya. Rincian mengenai indikator kinerja PUAP antara lain terdiri dari tiga indikator, yakni indikator kinerja input, indikator kinerja proses, dan indikator kinerja output. Ketiga indikator tersebut dapat dijadikan parameter dalam menilai keberhasilan atau efektivitas dalam pelaksanaan program PUAP.

Indikator kinerja input adalah kegiatan dan sumber daya/ dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Indikator kinerja output adalah sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan, dimana untuk memperoleh input diperlukan indikator dari kinerja proses (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2010).

Adapun ketiga indikator kinerja PUAP menurut Badan Penelitian dan

1. Indikator kinerja input, yang mana dapat dinilai dari aspek penyampaian, kesesuaian, dan manfaat dari input tersebut. Indikator kinerja input terdiri dari:

a. Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis

Ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang memuat berbagai bentuk pedoman dan petunjuk sehubungan dengan pelaksanaan PUAP, dimana Pedoman Umum (Pedum) merupakan suatu bentuk dokumen berisi segala bentuk panduan umum mengenai pelaksanaan PUAP. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sendiri adalah sebagai acuan bagi penyelenggara pelatihan dalam mempersiapkan dan melaksanakan berbagai pelatihan bagi pelaksanaan PUAP, sedangkan Petunjuk Teknis (Juknis) merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai hal teknis di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan PUAP.

b. Bantuan Langsung Masyarakat dan ketentuannya

Sejalan dengan strategi pembinaan Gapoktan PUAP untuk ditumbuhkan menjadi LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) dengan adanya pembagian dana dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), maka diperlukan aturan tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota Gapoktan sebagai organisasi. Adapun ketentuan tersebut yaitu:

- Anggaran Dasar

Anggaran Dasar (AD) yang merupakan aturan dasar dari sebuah lembaga Gapoktan yang disusun oleh petani pemilik Gapoktan dalam menentukan arah

- Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan penjabaran dari anggaran dasar yang memuat aspek: hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengelola, kegiatan usaha, modal dan simpanan anggota, pembinaan dan pengawasan, dan lain-lain.

c. Pelatihan dan Workshop

Pelatihan dan workshop merupakan bentuk pertemuan yang diadakan untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan seputar pelaksanaan PUAP, misalnya kegiatan pelatihan bagi Penyuluh Mitra Tani, pelatihan bagi Penyuluh Pendamping, pelatihan bagi Pengurus Gapoktan, serta berbagai bentuk pertemuan lainnya yang bertujuan untuk memberikan arahan tentang pelaksanaan PUAP.

d. Kelembagaan Gapoktan dan Kelompok Tani

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah organisasi petani yang terdiri dari kumpulan beberapa kelompok tani, dibentuk secara musyawarah dan mufakat dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok Tani (Poktan) sendiri merupakan kumpulan petani/ peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi (lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dalam pelaksanaan

kelompok tani adalah kelembagaan tani yang menjadi unit penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota.

- e. Rencana Usaha Bersama, Rencana Usaha Kelompok, dan Rencana Usaha Anggota (Kelayakan Usaha)

Dana BLM yang disalurkan kepada Gapoktan sebagai modal usaha dikelola oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA). RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. Penyusunan RUB dilakukan oleh Ketua Gapoktan dari rekapitulasi RUA yang terhimpun dalam RUK. Penyusunan RUK dilakukan oleh ketua kelompok tani, dimana penyusunan RUK berasal dari rekapitulasi dari pengajuan-pengajuan kredit usaha anggota dalam RUA.

- f. Ketersediaan Input Usaha dan Teknologi

Untuk menunjang keberhasilan usaha/ produksi pertanian diperlukan akses terhadap ketersediaan input usaha dan teknologi. Tidak tersedianya input seperti bibit, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian secara efektif merupakan salah satu kendala dalam mencapai keberhasilan usaha tani. Untuk meningkatkan produktivitas yang berdaya hasil tinggi, diperlukan inovasi teknologi yang bisa diadopsi oleh petani. Oleh karena itu, keberadaan

menjamin ketersediaan input usaha dan teknologi untuk mencapai tujuan tersebut.

g. Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya alam (SDA) berperan penting dalam pengembangan agribisnis, dimana sumber daya alam di sini mencakup sumber daya pertanian yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan produksi (*on farm*), mencakup potensi lahan, pengairan, tanaman, ternak, dan iklim. Selain potensi sumber daya alam, untuk membangun Gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Sumber daya manusia di sini mencakup pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PUAP, baik petani sebagai anggota kelompok tani maupun pengurus Gapoktan.

2. Indikator kinerja proses, terdiri dari:

a. Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan dan pendampingan adalah kegiatan yang berupa kunjungan, rapat, dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/ Kota maupun Tim Teknis Kecamatan, Penyuluh Pendamping, dan Penyuluh Mitra Tani kepada Gapoktan PUAP dalam rangka pemberdayaan petani, kelompok tani, dan Gapoktan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan PUAP, khususnya mengenai pengelolaan dana BLM dan

b. Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana BLM dan dana keswadayaan anggota. Dana yang dikelola LKM-A sebisa mungkin dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha agribisnis anggota. Pengukuran kinerja aspek manajemen pengelolaan LKM-A pada Gapoktan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan.

c. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat

Penyaluran dana BLM dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Penarikan dana BLM dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh anggota. Dana BLM digunakan untuk memberikan bantuan modal secara kredit kepada petani melalui Gapoktan. Penyaluran dana BLM dinilai efektif jika sebagian besar ditujukan untuk pembiayaan usaha tani, dimana persentase pembiayaannya dinilai tinggi jika $> 80\%$.

d. Pengelolaan Usaha Pertanian

Keberhasilan proses pelaksanaan PUAP dapat dilihat dari bagaimana bentuk penggunaan dana BLM dalam pengelolaan usaha pertanian. Dana BLM harus dikelola dan diarahkan untuk pembiayaan usaha ekonomi produktif dan terus berkembang sesuai dengan prinsip pemberdayaan untuk disalurkan

e. Pengembangan Pasar

Gapoktan sebagai lembaga ekonomi difungsikan tidak hanya untuk memberikan pelayanan keuangan, penyediaan saprodi, tetapi juga untuk pemasaran hasil pertanian anggota melalui dana BLM yang diperoleh mengingat PUAP merupakan program yang berbasis pada pengembangan usaha agribisnis, dimana pemasaran merupakan salah satu sub sistem dalam pengembangannya.

f. Inovasi Teknologi dan Kelembagaan

Pemanfaatan dana BLM untuk mengembangkan usaha agribisnis diharapkan dapat tercapai dengan munculnya inovasi di bidang teknologi serta mendayagunakan kelembagaan Gapoktan yang tersedia untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan usaha tani.

3. Indikator kinerja output, terdiri dari:

a. Perguliran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (*Revolving*)

Perguliran dana yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyangkut kemampuan anggota Gapoktan dalam mengembalikan dana BLM yang telah diberikan sebelumnya dalam bentuk pinjaman, dimana dana yang telah dikembalikan tersebut selanjutnya akan dihimpun untuk digulirkan lagi dalam bentuk bantuan modal yang akan dipinjamkan kembali kepada petani dalam

diikuti dengan... Efektivitas perguliran dana dapat dilihat

dari persentase kredit macet, dimana perguliran dana dianggap efektif jika persentasenya $< 5\%$.

b. Keberlanjutan/ Keberhasilan usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

Keberhasilan usaha LKM-A dapat dilihat dari dampak yang diperoleh dari proses pendampingan yang secara nyata dapat ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola keuangan serta keberlanjutan dari usaha pengelolaan LKM-A itu sendiri.

c. Peningkatan Produktivitas

Penggunaan dana BLM untuk pengadaan input produksi tentunya diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap produktivitas yang dihasilkan dari pengelolaan usaha tani, dimana hal ini merupakan suatu bentuk output untuk menilai efektivitas dari pelaksanaan PUAP. Mengingat input produksi yang diberikan dalam program ini berupa bantuan modal dalam bentuk dana BLM, penilaian produktivitas dapat disesuaikan dengan menilai produktivitas modal yang dihasilkan dari penggunaan dana BLM.

d. Pengembangan Usaha Agribisnis

Pengembangan agribisnis di perdesaan merupakan aspek utama yang diharapkan dari adanya pelaksanaan program PUAP, dimana outputnya dapat dilihat dari tercapainya kinerja usaha agribisnis tersebut dalam hal penyediaan

usaha, pengadaan nilai tambah dengan adanya usaha pengolahan hasil usahatani, dan pengembangan pemasaran hasil sebagai sektor hilir.

F. Penelitian Terdahulu Mengenai Program Bantuan Penguatan Modal Bergulir

Penelitian Koko (2009) mengenai Pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis pendapatan usaha tani, uji t-statistik, uji korelasi, dan analisis R/C rasio. Berdasarkan hasil penelitian di tiga Gapoktan dengan menggunakan uji korelasi, diperoleh hasil bahwa pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan sebelum dan setelah adanya PUAP berdasarkan indikator organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Gapoktan itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut mayoritas responden petani yang menggunakan dana BLM-PUAP untuk menambah usahanya dan menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena merasakan manfaat langsung dari pinjaman dana tersebut.

Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa anggota Gapoktan sebelum dan setelah menerima BLM-PUAP mengalami perubahan peningkatan. Hal ini dibuktikan melalui uji t-hitung terhadap perubahan pendapatan yang menyimpulkan bahwa

Penelitian Sagala (2010), mengenai Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan alat analisis pendapatan usaha tani, uji t-statistik, dan analisis R/C rasio. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terjadi perubahan pendapatan petani padi antara sebelum dan sesudah adanya program PUAP.

Hasil penelitian Pertiwi (2006) mengenai Pengaruh Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan). Penelitian ini memberikan gambaran bahwa program-program yang digulirkan baik dalam bentuk dana bantuan maupun pelatihan kepada masyarakat yang menekuni sektor riil sangat diminati dan mendapatkan respon yang positif. Walaupun program ini tidak berada pada sektor pertanian di perdesaan, akan tetapi persamaannya adalah dari tujuan dana tersebut digulirkan. Dari program tersebut lapangan kerja tercipta sehingga pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan menjadi turun dengan signifikan. Hanya saja dari program ini sistem pengawasan dan pengendalian tidak sebaik dari program pemerintah yang sejenis.

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi (2006) mengenai Pengaruh Pengelolaan Kredit Mikro Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Analisis Pendapatan Keluarga Miskin (Studi kasus di Kota Depok, Jawa Barat). Penelitian ini memberikan pengertian bahwa kredit sebesar apapun yang diruntuhkan bagi warga miskin akan memperoleh respon yang positif

Dana yang bergulir tersebut akan memberikan stimulus bagi warga miskin untuk memperkuat perekonomiannya. Pemberian kredit mikro dengan melibatkan Bank BUMN akan memberikan iklim usaha yang baik bagi dunia perbankan dan sektor ekonomi mikro, sehingga perekonomian nasional perlahan akan naik.

G. Kerangka Berfikir

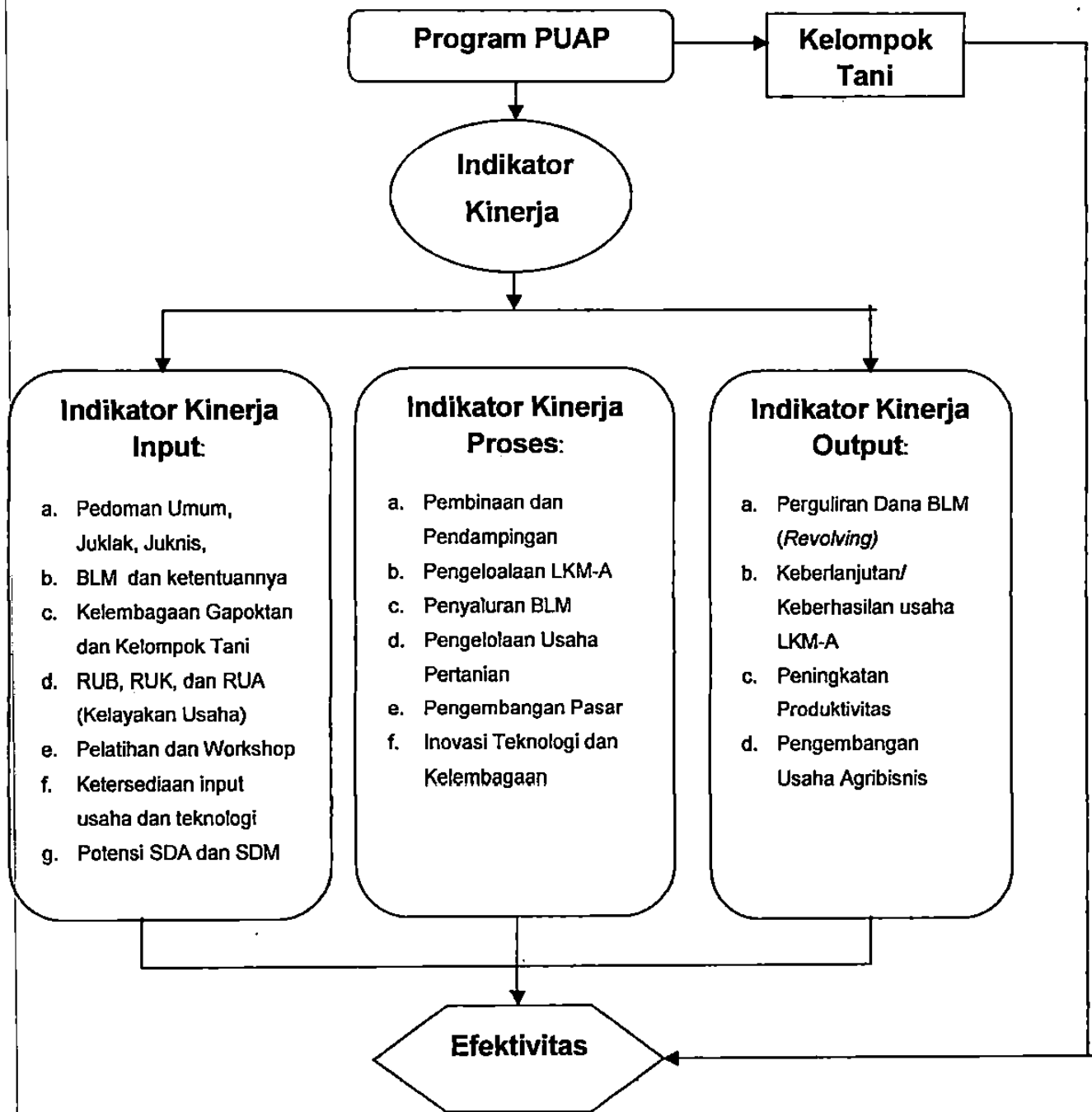
PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) adalah bagian dari PNPM Mandiri yang merupakan terobosan dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah yang menjadi target pelaksanaan program. Pada dasarnya, sebagian besar petani menghadapi kendala dalam permodalan, baik modal diri sendiri maupun akses terhadap lembaga permodalan yang ada. Dalam mengatasi keterbatasan modal tersebut, melalui program PUAP, dengan dana APBN pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan modal dalam bentuk BLM.

Untuk menunjang keberhasilan usahatani yang berupa kegiatan produksi pertanian, tentunya diperlukan akses terhadap ketersediaan input, pasar, dan teknologi. Dari kesemua aspek dalam produksi pertanian, yang terpenting adalah ketersediaan modal usaha. Melalui program PUAP, dilakukan kegiatan penyaluran dana BLM sebagai bentuk bantuan modal bagi petani, dimana penyaluran dana tersebut nantinya disalurkan melalui kelompok tani/ Gapoktan. Dana BLM ini pada

stimulus dalam menggerakkan usaha tani petani yang kemudian dikelola melalui LKM-A.

Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani serta sekaligus menentukan arah pembinaan kelembagaan petani di perdesaan. Gapoktan sebagai pelaksana PUAP memiliki fungsi sebagai wadah penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota, dimana ia diarahkan untuk dapat dibina dan ditumbuhkan menjadi LKM-A sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan.

Dalam pelaksanaannya, program PUAP ini diharapkan dapat mencapai efektivitas atau keberhasilan. Efektivitas PUAP dapat dinilai melalui beberapa indikator kinerja, diantaranya: indikator kinerja input, indikator kinerja proses, dan



Gambar 1. Kerangka Berfikir Efektivitas Pelaksanaan Program